

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pengelolaan daerah secara mandiri untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan masyarakat adalah tujuan dari otonomi daerah. Melalui otonomi daerah, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik (Yandip, 2022). Selain itu, diharapkan mampu memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah (Monica Ayu, 2022).

Dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik, pemerintah daerah hendaknya mampu mengalokasikan dana dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun kabupaten dan kota (Herling, 2019) dan dana tersebut dialokasikan untuk setiap aspek yang diperlukan dalam pelaksanaan di setiap daerah sesuai dengan Undang-undang No 33/2004 (Irfan Sofi, 2021).

Peningkatan aspek kesejahteraan masyarakat digambarkan melalui peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks ini merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan antara lain memperoleh penghasilan, kesehatan dan pendidikan (Arif Budimanta, 2020:252). Untuk itu perlu ditingkatkan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga meningkatkan daya saing yang tinggi.

Hal ini terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia yang meningkat setiap tahunnya.

Naiknya IPM tidak semata-mata didasarkan pada pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi baru merupakan syarat mutlak. Agar pertumbuhan ekonomi sesuai dengan pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan syarat, yaitu pemerataan pembangunan yang memadai untuk pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, yang akan berdampak pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat untuk kesejahteraan sehingga diukur dengan IPM akan meningkat (Abdul Halim, dkk. 2020: 129).

Pengukuran keberhasilan IPM dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya rasio keuangan daerah dan didalam rasio keuangan daerah ada faktor yang mempengaruhi salah satunya adalah Dana Alokasi Umum (DAU). Dana Alokasi Umum merupakan dana yang dialokasikan untuk pemerataan keuangan antar daerah yang dimaksud untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah (UU Nomor 33 tahun 20014).

DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah dan potensi daerah, sehingga terjadi transfer cukup signifikan didalam APBN dari pemerintah pusat kepada pemda, dan pemda secara leluasa dapat menggunakan DAU untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat (Adel, dkk, 2019) dan

layanan publik yang baik dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Adhi, 2022).

Menurut Kemenkumham Yasonna H lauly (2021) terdapat kecenderungan penggunaan DAU belum dioptimalkan untuk belanja modal dan belanja yang terkait langsung dengan pelayanan publik dan perekonomian dimana penggunaan DAU yang tidak produktif belum mampu sepenuhnya meningkatkan pelayanan dan perekonomian daerah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani (2021) menyoroti jumlah uang perjalanan PNS di daerah lebih besar dari pusat. Menjadikan belanja pegawai dalam APBD lebih besar dari belanja modal. Sehingga penggunaan DAU masih didominasi 64,8% dari belanja pegawai. Hal ini terlihat dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai dan ironisnya masyarakat hanya mendapat sekitar 35% atau hanya sepertiganya saja, sehingga porsi anggarannya harus diubah agar masyarakat dapat merasakan manfaatnya.

Menteri Dalam Negeri M. Tito (2021) jumlah belanja pegawai masih lebih besar dari belanja modal dan barang, dimana belanja modal dan barang merupakan belanja yang sangat menyentuh masyarakat untuk kepentingan menyejahterakan rakyat tetapi yang banyak memakan belanja aparaturnya. Hal ini menunjukkan bahwa dana DAU yang seharusnya berdampak besar bagi masyarakat justru mendapat porsi yang kecil, sehingga pembangunan kurang optimal.

Setelah sempat tertekan pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19, IPM Indonesia pada tahun 2021 mulai membaik, tumbuh 0,49%, lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang 0,03% namun masih lebih rendah dari tahun 2019 yang tumbuh 0,74%. Di masa pandemi COVID-19, IPM Indonesia masih meningkat dari 71,92 pada 2019 menjadi 71,94 pada 2020, kemudian meningkat lagi menjadi 72,29 pada 2021. Meski IPM Indonesia terus meningkat, pertumbuhan IPM dalam empat tahun terakhir didominasi oleh perlambatan ekonomi dan pertumbuhan tersebut terutama di tahun 2020 seiring dengan semakin meluasnya penyebaran COVID-19 yang kemudian diikuti dengan pembatasan kegiatan di berbagai bidang.

Perbaikan IPM Indonesia pada tahun 2021 terutama didorong oleh peningkatan dimensi standar hidup layak yang diwakili oleh variabel pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan. Variabel ini tumbuh 1,30% pada tahun 2021, setelah mengalami kontraksi 2,53% pada tahun sebelumnya. Sedangkan dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh variabel Angka Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) tumbuh 0,14%, dimensi pengetahuan diwakili oleh variabel Harapan Lama Sekolah (HSL) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) masing-masing tumbuh sebesar 0,77% dan 0,71%.

Tabel 1. 1

**DAU, Pertumbuhan IPM, LPE pada Kabupaten dan Kota Provinsi
Jawa Barat periode 2019**

Wilayah Jawa Barat	2019		
	DAU	Pertumbuhan IPM	LPE (%)
Provinsi Jawa Barat	Rp 3.212.647.404.000	1,02	5,02
Bogor	Rp 2.034.853.421.000	1,38	5,85
Sukabumi	Rp 1.654.343.840.000	1,24	5,64
Cianjur	Rp 1.627.020.432.000	1,18	5,67
Bandung	Rp 2.149.817.107.000	0,92	6,36
Garut	Rp 1.837.050.436.000	1,22	5,02
Tasikmalaya	Rp 1.508.324.968.000	0,98	5,43
Ciamis	Rp 1.212.593.846.190	1,09	5,38
Kuningan	Rp 1.243.359.240.000	0,83	6,59
Cirebon	Rp 1.591.291.632.000	0,94	4,68
Majalengka	Rp 1.167.367.009.900	1,2	7,77
Sumedang	Rp 1.180.828.452.000	0,66	6,33
Indramayu	Rp 1.418.027.397.000	0,92	3,2
Subang	Rp 1.323.634.343.000	0,56	4,61
Purwakarta	Rp 889.747.462.000	0,99	4,37
Karawang	Rp 1.325.136.164.000	1,39	4,21
Bekasi	Rp 1.219.550.987.000	0,68	3,95
Bandung Barat	Rp 1.126.707.364.000	1,2	5,05
Pangandaran	Rp 568.022.063.000	1,14	5,94
Kota Bogor	Rp 838.948.449.000	0,75	6,19
Kota Sukabumi	Rp 519.590.243.000	1,03	5,53
Kota Bandung	Rp 1.798.102.095.000	0,69	6,79
Kota Cirebon	Rp 593.145.833.000	0,77	6,29
Kota Bekasi	Rp 1.265.997.762.000	0,68	5,41
Kota Depok	Rp 950.369.136.000	0,66	6,74
Kota Cimahi	Rp 598.700.744.000	0,71	7,85
Kota Tasikmalaya	Rp 829.431.434.000	1,12	5,97
Kota Banjar	Rp 386.560.916.000	0,7	5,03
Nilai Maksimum	Rp 2.149.817.107.000	1,39	7,85
Nilai Minimum	Rp 386.560.916.000	0,56	3,2
Rata-rata	Rp 1.216.982.325.040	0,95	5,61

Sumber : Badan Pusat Statistik, data diolah (2022)

Keterangan :

	Daerah Yang Memiliki Nilai Terendah
	Daerah Yang Memiliki Nilai Tertinggi
	Daerah Yang Memiliki Dibawah Nilai Rata-rata

Tabel 1. 2
DAU, Pertumbuhan IPM, LPE pada Kabupaten dan Kota Provinsi
Jawa Barat periode 2020-2021

Wilayah Jawa Barat	2020			2021		
	DAU	P-IPM	LPE (%)	DAU	P-IPM	LPE (%)
Provinsi Jawa Barat	Rp 2.964.612.155.000	0,08	-2,52	Rp 3.107.449.500.000	0,5	3,74
Bogor	Rp 1.833.157.955.000	-0,35	-1,76	Rp 1.924.846.835.000	0,28	3,55
Sukabumi	Rp 1.641.881.762.000	0,01	-0,92	Rp 1.540.373.990.000	0,28	3,75
Cianjur	Rp 1.630.334.869.000	-0,03	-0,78	Rp 1.532.487.814.000	0,31	3,48
Bandung	Rp 2.176.386.196.000	-0,03	-1,8	Rp 2.011.680.028.000	0,47	3,56
Garut	Rp 1.697.761.221.000	-0,15	-1,26	Rp 1.721.028.659.000	0,5	3,58
Tasikmalaya	Rp 1.403.102.763.000	0,05	-0,98	Rp 1.421.519.801.000	0,35	3,43
Ciamis	Rp 1.239.756.052.000	0,14	-0,14	Rp 1.135.769.046.000	0,62	3,66
Kuningan	Rp 1.253.033.651.000	0,38	0,11	Rp 1.148.735.374.000	0,48	3,56
Cirebon	Rp 1.586.441.378.000	0,09	-1,08	Rp 1.452.822.229.000	0,54	2,47
Majalengka	Rp 1.254.459.921.000	0,1	0,89	Rp 1.148.956.857.000	0,33	4,75
Sumedang	Rp 1.197.044.434.000	0,25	-1,12	Rp 1.093.941.300.000	0,22	3,17
Indramayu	Rp 1.307.670.691.000	0,48	-1,58	Rp 1.325.416.407.000	0,52	0,58
Subang	Rp 1.337.445.993.000	0,38	-1,15	Rp 1.221.080.162.000	0,26	2,4
Purwakarta	Rp 898.130.016.000	0,21	-2,13	Rp 825.439.607.000	0,23	3,42
Karawang	Rp 1.216.810.516.000	-0,28	-3,8	Rp 1.239.612.869.000	0,4	5,85
Bekasi	Rp 1.109.084.444.000	0,11	-3,4	Rp 1.133.188.299.000	0,51	3,65
Bandung Barat	Rp 1.026.882.842.000	-0,28	-2,41	Rp 1.044.339.297.000	0,31	3,46
Pangandaran	Rp 573.605.400.000	-0,22	-0,05	Rp 521.916.224.000	0,32	3,67
Kota Bogor	Rp 850.811.547.000	-0,16	-0,41	Rp 776.739.453.000	0,63	3,76
Kota Sukabumi	Rp 523.911.846.000	-0,13	-1,49	Rp 478.905.738.000	0,53	3,71
Kota Bandung	Rp 1.776.235.910.000	-0,13	-2,28	Rp 1.617.852.903.000	0,55	3,76
Kota Cirebon	Rp 605.092.285.000	-0,04	-0,98	Rp 554.276.295.000	0,48	3,04
Kota Bekasi	Rp 1.282.106.240.000	-0,11	-2,58	Rp 1.175.540.512.000	0,55	3,22
Kota Depok	Rp 946.332.371.000	0,19	-1,92	Rp 871.603.788.000	0,49	3,76
Kota Cimahi	Rp 542.550.698.000	-0,36	-2,26	Rp 547.976.205.000	0,3	4,19
Kota Tasikmalaya	Rp 839.045.684.000	0,27	-2,01	Rp 766.651.766.000	0,37	3,57
Kota Banjar	Rp 393.681.442.000	-0,07	0,94	Rp 358.176.982.000	0,31	3,46
Nilai Mak.	Rp 2.176.386.196.000	0,48	0,94	Rp 2.011.680.028.000	0,63	5,85
Nilai Min.	Rp 393.681.442.000	-0,36	-3,8	Rp 358.176.982.000	0,22	0,58
Rata-rata	Rp 1.190.472.523.222	0,01	-1,35	Rp 1.132.995.497.778	0,42	3,47

Sumber : Badan Pusat Statistik, data diolah (2022)

Keterangan :



Daerah Yang Memiliki Nilai Terendah

Daerah Yang Memiliki Nilai Tertinggi

Daerah Yang Memiliki Dibawah Nilai Rata-rata

Berdasarkan tabel 1.1 dan tabel 1.2 terlihat pada tahun 2019-2021 pertumbuhan IPM, DAU, dan pertumbuhan ekonomi terus mengalami kemajuan di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dengan nilai yang sangat bervariasi. Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang mengalami tekanan berat akibat pandemi. Pencapaian IPM Provinsi Jawa Barat menunjukkan kemajuan pesat yang ditandai dengan peningkatan status pembangunan manusia.

Kendati begitu, tidak semua kota dan kabupaten mengalami kenaikan IPM yang cukup baik dan tidak diiringi dengan besarnya DAU juga pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Hal ini dilihat berdasarkan capaian IPM pada tahun 2021, IPM dengan status ter “tinggi” di Jawa Barat adalah Kota Bandung 81,96% atau meningkat 0,55% dengan besarnya DAU Rp1.617.852.903.000 diikuti Pertumbuhan ekonomi 3,76% dan IPM terendah adalah Kabupaten Cianjur 65,56% atau meningkat 0,31% dengan status IPM “sedang” dengan besarnya DAU Rp1.532.487.814.000 diikuti pertumbuhan ekonomi 3,48%. Selisih capaian IPM Kabupaten dan kota tahun 2021 mencapai 16,40 poin.

Kemudian berdasarkan pertumbuhan IPM terendah terjadi di Kabupaten Sumedang 0,22% dan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi 3,17% dan besarnya DAU Rp1.093.941.300.000 sedangkan pertumbuhan IPM tertinggi terjadi di Kota Bogor yaitu 0,63% diikuti laju pertumbuhan ekonomi 3,76% dan besarnya DAU Rp776.739.453.000.

Dan berdasarkan besarnya Dana Alokasi Umum setiap daerah pada tahun 2021, Kabupaten Bandung memiliki DAU tertinggi sebesar Rp2.011.680.028.000

diikuti dengan pertumbuhan ekonomi 3,56% dan pertumbuhan IPM 0,47% atau mencapai 72,73 dan DAU terendah dimiliki Kota Banjar sebesar Rp358.176.982.000 dan diikuti dengan pertumbuhan ekonomi 3,46% dan pertumbuhan IPM 0,31% atau mencapai 71,92.

Berdasarkan laju pertumbuhan ekonomi setiap daerah pada tahun 2021, Kabupaten Karawang memiliki laju pertumbuhan ekonomi tertinggi 5,85% diikuti dengan besarnya DAU Rp1.239.612.869.000 dan pertumbuhan IPM 0,4% atau mencapai 70,94 dan terendah dimiliki Kabupaten Indramayu 0,58% diikuti dengan besarnya DAU Rp1.325.416.407.000 dan pertumbuhan IPM 0,52% atau mencapai 67,64. Artinya peningkatan laju IPM tidak diiringi dengan laju pertumbuhan ekonomi dan besarnya DAU mengalami penurunan atau peningkatan berbeda dengan kabupaten/kota se-Jawa Barat dimana pada umumnya dana perimbangan ditransfer dari pemerintah pusat cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dan besarnya DAU setiap daerah mempengaruhi peningkatan IPM dan Pertumbuhan Ekonomi.

Pada tahun 2020 dan 2021, realisasi dana perimbangan provinsi dan wilayah kabupaten/kota mengalami penurunan yang terjadi pada DAU. Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah pandemi covid-19 sehingga berdampak pada refocusing anggaran.

Sekjen Kemendagri, Muhhamad Hudori (2021) APBD 2020 terjadi pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat akibat kurangnya penerimaan negara dampak dari covid-19. Kurangnya ketersediaan dana akibat pengurangan

dana transfer yang berimbas pada pendanaan kegiatan yang bersumber dari dana transfer membuat Kemedagri mendorong pemda mengambil langkah-langkah percepatan APBD Tahun 2021 dengan fokus mengatasi covid-19, mendorong pemulihan ekonomi dan peningkatan pelayanan publik di daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai referensi dalam penelitian ini yang dilakukan Helena, dkk (2022) Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan Eri dan Rifki (2022) Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang dilakukan Novi dan Meirinaldi (2021) Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Adib, dkk (2022) bahwa Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Kemudian penelitian yang dilakukan Satmaka dan Parju (2022) Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Tirza, dkk (2021) Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Dapat dilihat bahwa rata-rata faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan hasil yang berfluktuasi, hal ini kemudian menjadi fenomena gap. Kemudian beberapa penelitian sebelumnya juga

menunjukkan hasil yang berbeda pada masing-masing variabel yang menyebabkan adanya *research gap*.

Berdasarkan uraian fenomena, teori dan hasil penelitian sebelumnya, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Yang Dipengaruhi Dana Alokasi Umum Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Kabupaten / Kota Di Provinsi Jawa Barat)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah yang terjadi sebagai berikut :

- 1) Adanya peningkatan capaian Indeks Pertumbuhan Manusia tidak diiringi dengan laju pertumbuhan ekonomi dan besarnya DAU daerah yang diberikan.
- 2) Adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi namun tidak dipengaruhi besarnya Dana Alokasi Umum dan peningkatan IPM setiap daerah.
- 3) Dana Alokasi Umum yang dianggarkan pemerintah pusat untuk daerah mengalami penurunan sehingga berdampak pada *refocusing* (pengalokasian) anggaran.
- 4) Adanya peningkatan capaian Indeks Pertumbuhan Manusia tidak diiringi dengan laju pertumbuhan ekonomi dan realisasi dana perimbangan pada DAU yang cukup baik.

1.3 Rumusan Masalah

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah di dapat, maka penulis dapat menuliskan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian sebagai berikut:

- 1) Seberapa besar pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
- 2) Seberapa besar pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
- 3) Seberapa besar pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
- 4) Seberapa besar pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Pertumbuhan Ekonomi.

1.4 Maksud Dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mnguji secara empiris peningkatan Indeks Pembangunan Manusia yang dipengaruhi Dana Alokasi Umum dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel intervening.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui besar pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Barat.
- 2) Untuk mengetahui besar pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap

Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Barat.

- 3) Untuk mengetahui besar pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Barat.
- 4) Untuk mengetahui besar pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Barat.

1.5 Kegunaan Penelitian

Menurut Sugiyono (2015:388) mengatakan bahwa Kegunaan penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan dan terjawabnya rumusan masalah secara akurat.

Informasi yang berhasil dikumpulkan selama penelitian ini yang diperoleh dari perusahaan penulis diharapkan dapat memberikan manfaat bagi instansi dan bagi pihak yang lainnya.

1.5.1 Kegunaan Praktis

- 1) Bagi Pihak Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai bahan masukan dan gambaran kepada aparatur pemerintah agar mengelola dana untuk program peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi dari Dana Alokasi Umum yang diberikan pemerintah pusat dengan baik dan bisa mencapai target dari program tersebut serta penelitian ini dapat digunakan

sebagai bahan pengambilan keputusan dalam membuat dan menetapkan kebijakan serta dalam memperbaiki kinerja.

2) Bagi Pihak Lembaga/Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, mengenai kualitas dari pengelolaan dana keuangan selama periode tahun 2019-2021. Sehingga hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai cerminan dan salah satu bahan pertimbangan dalam pengalokasian dana pada tahun berikutnya.

1.5.2 Kegunaan Akademis

1) Bagi Pengembangan Ilmu Akuntansi

Dapat menambah ilmu pengetahuan dan referensi khususnya pada ilmu akuntansi sektor publik yang terkait dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia yang dipengaruhi Dana Alokasi Umum dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel intervening.

2) Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat menjadi referensi dan literatur bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti terkait dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia yang dipengaruhi Dana Alokasi Umum dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel intervening.